

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KUALITAS AUDIT DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE

Anissa Setiawati Putranti
Yulita Setiawanta
Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRACT

Tax avoidance is efforts by taxpayers in this case a company, to minimize the tax charge and optimize profits. In assumption where tax is a cost which affect to income. This study aims to find out influence of institutional ownership, Board Commissioner structure, audit quality and the audit committee on tax avoidance of companies listed on Indonesia Stock Exchange 2013.

From data obtained, the number of companies listed in 2013 as many as 475 companies, by using purposive sampling method, there were 279 companies that meet the criteria and used as sample in this research, as (1) list of companies listed on BEI 2013. (2) The company which has data annual and consolidation financial report. (3) companies that used Rupiah. (4) companies showing fiscal profit reports. (5) There are researchers variables data related in this paper is on annual and consolidated financial report. Furthermore, the data processed in SPSS V.16 using data analysis in form of descriptive statistics, classical assumption test, model test (ANOVA / F test), hypothesis test and coefficients determination.

The result of the study shows institutional ownership have significantly and negatively effect, percentage of board commissioner is insignificantly and has negative effect, the amount of board commissioner and audit quality has significant and positive effect, audit committee has insignificant and negative effect on tax avoidance.

Keywords : institutional ownership, board commissioner structure, audit quality, audit committee, and tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur penting bagi negara – negara di dunia. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak merupakan presentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (Fadhilah, 2014). Akan tetapi perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba dari usaha. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba yang diterima oleh perusahaan, sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on*

investment. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya akan menurunkan *after tax profit, rate of return and cash flows* (Rohman,2013).

Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur tata kelola perusahaan yang baik akan memengaruhi berbagai macam cara dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Jaya,2014).

Topik lain terkait tentang pengaruh kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Annisa (2012), Fadhilah (2014), Pranata (2014), Jaya (2014), Rijal (2014) dan lain – lain. Dari beragam penelitian yang telah dilakukan, memiliki hasil yang berbeda – beda antara peneliti satu dengan penelitian lainnya.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Annisa (2012). Variabel pengaruh kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit dalam penelitian oleh Annisa (2012) masih digunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan *book tax gap* untuk mengukur *tax avoidance* pada perusahaan yang akan diteliti yang juga digunakan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pengaruh variabel yang telah di uji masih memiliki pengaruh yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sedangkan objek penelitian sebelumnya merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya,2014). Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dalam Fadhilah,2014).

Struktur Dewan Komisaris

Dalam perusahaan, dewan komisaris bertindak sebagai badan legislatif dan direksi berfungsi selaku badan eksekutif atau dapat pula sebagai badan legislatif. Dewan komisaris memiliki kewenangan mengawasi kepemimpinan dan pekerjaan yang dilakukan oleh direksi, dalam hal ini dewan komisaris selaku para pemegang saham berwenang mencatat sementara anggota direksi bila yang bersangkutan

ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan (Zain,2008).

Komite Audit

Komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance* (Pranata,2014). Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhillah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan.

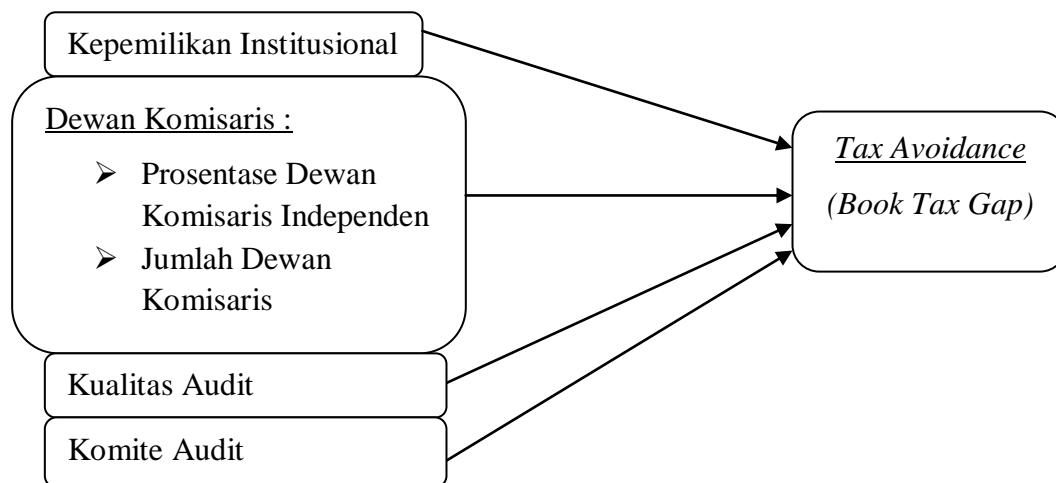
Kualitas Audit

Berdasarkan Standart Profesi Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standart auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Selain itu faktor pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (*supervisor*), profesionalisme dan beban kerja menjadi faktor pendukung dalam terciptanya suatu kualitas audit. Dikutip dari Annisa (2012), laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*.

Book Tax Gap

Peraturan perpajakan dan akuntansi memiliki tujuan yang berbeda sehingga menghasilkan laba menurut akuntansi dan pajak yang berbeda, perbedaan ini dikenal sebagai *book tax gap* dan terjadi hamper di semua negara. Riset akuntansi dan pajak banyak menganalisis faktor dan dampak dari perbedaan tersebut. Terjadinya fenomena *book tax gap* ini menimbulkan peluang terjadinya manajemen laba yang akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba (Tang dalam Persada,2010).

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 1. Hubungan beberapa variabel tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

H2 : Prosentase dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*

H3 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

H4 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

H5 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu :

- a. Variabel terikat (*dependent variable*) sebagai variabel Y dalam penelitian ini adalah *tax avoidance (book tax gap)*.
- b. Variabel bebas (*independent variable*) sebagai variabel X dalam penelitian ini adalah, kepemilikan institusional (X1), prosentase dewan komisaris (X2), jumlah dewan komisaris (X3), kualitas audit (X4), dan komite audit (X5).

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada satu periode yakni tahun 2013. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dan diambil dari laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampelnya yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria – kriteria tertentu. Berikut adalah pertimbangan – pertimbangan yang digunakan untuk menyeleksi sample dari populasi penelitian tersebut yaitu :

1. Daftar seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013.
2. Perusahaan yang memiliki data *annual report* dan laporan keuangan konsolidasian.
3. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang menampilkan laporan laba fiskal.
5. Data terkait variabel peneliti terdapat pada *annual report* dan laporan konsolidasi yang ditampilkan perusahaan.

Metode Analisis Data

Analisis kuantitatif datanya berupa angka, angka yang digunakan adalah angka yang sesungguhnya dengan skala pengukuran rasio dan interval. Data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dengan rumus atau metode statistik yang sudah disediakan. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi statistik diskriptif, uji karakter data, uji model, uji hipotesis dan koefisien diterminasi.

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
X1	= Kepemilikan Institusional
X2	= Prosentase Dewan Komisaris Independen
X3	= Jumlah Dewan Komisaris
X4	= Kualitas Audit
X5	= Komite Audit
e	= Variabel Pengganggu (<i>residual error</i>)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Dimana dapat dilihat pengambilan sampel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan di BEI
1. Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013	472
2. Perusahaan yang tidak memiliki <i>annual report</i> dan laporan keuangan konsolidasian	(120)
3. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah	(58)
4. Perusahaan yang tidak menampilkan laporan laba fiskal	(15)
5. Perusahaan yang data terkait variabel peneliti pada <i>annual report</i> dan laporan keuangan konsolidasi tidak lengkap	(0)
Jumlah Sampel	279

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Diskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INST	279	.1812	.9993	.712899	.1714343
INDP	279	.1666	1.0000	.426452	.1350456
DK	279	2.00	10.00	4.1649	1.64952
AUDIT	279	.00	1.00	.3656	.48246
KOMITE	279	2.00	6.00	3.1111	.49296
LN_BTG	202	3.56	16.95	11.1024	2.33052
Valid N (listwise)	202				

Uji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		202
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.00814369
Most Extreme Differences Absolute		.065
	Positive	.049
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.929
Asymp. Sig. (2-tailed)		.354

a. Test distribution is Normal.

Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov
Smirnov

Dari tabel 4.2 dapat dilihat besarnya nilai statistic Kolmogorov – Smirnov untuk variabel *book tax gap* (BTG) adalah $KS = 0.929$ dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.354 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% , nilai variabel BTG diatas dari nilai signifikansi ($0.354 > 0,05$). Dapat disimpulkan variabel BTG memiliki distribusi normal dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya.

Uji Hipotesis

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	11.252	1.289	.000
INST	-2.815	.818	.001
INDP	-.420	1.176	.721
DK	.479	.089	.000

AUDIT	.976	.311	.002
KOMITE	-.132	.323	.683

a. Dependent Variable: LN_BTG

Temuan penelitian ini adalah bahwa variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai signifikansi ($\alpha = 0.001$) < 0.05 , maka disimpulkan variabel kepemilikan institusional (INST) berpengaruh signifikan terhadap variabel *book tax gap* (BTG) akan tetapi memiliki arah yang negatif ini berarti semakin tinggi INST maka semakin rendah BTG nya. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

Variabel struktur dewan komisaris yang diproksikan dengan prosentase dewan komisaris independen (INDP) memiliki nilai signifikansi ($\alpha = 0.721$) > 0.05 , maka disimpulkan prosentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap* (BTG) serta memiliki arah yang negatif sehingga semakin tinggi INDP maka semakin rendah BTG nya. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

Variabel struktur dewan komisaris yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris (DK) memiliki nilai signifikansi ($\alpha = 0.000$) < 0.05 , maka disimpulkan jumlah dewan komisaris independen (DK) berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap* (BTG) serta memiliki arah positif sehingga semakin tinggi DK maka semakin tinggi pula BTG nya. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

Variabel kualitas audit (AUDIT) memiliki nilai signifikansi ($\alpha = 0,002$) < 0.05 , maka disimpulkan variabel kualitas audit (AUDIT) berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap* (BTG) serta memiliki arah positif maka semakin tinggi AUDIT tinggi pula BTG nya. Dengan demikian hipotesis keempat ditolak.

Variabel jumlah komite audit (KOMITE) memiliki nilai signifikansi ($\alpha = 0.683$) > 0.05 , maka disimpulkan jumlah komite audit (KOMITE) tidak berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap* (BTG) serta memiliki arah negatif sehingga semakin tinggi KOMITE maka semakin rendah BTG nya. Dengan demikian hipotesis kelima ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (INST) mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap*. Selain itu berdasarkan nilai B atau beta, kepemilikan institusional berarah negatif (- 2.815) terhadap BTG. Sedangkan menurut teori memiliki arah yang positif yang berarti tingginya nilai INST maka akan tinggi pula nilai BTG berlaku sebaliknya. Hasil ini patut diduga karena dikontribusi dengan karakter data yang diolah yang sama dengan hasil penelitian. Sebagai contoh nilai mean Y = 11.1024 dan mean INST = 0.712899, pada sampel terdapat perusahaan yang memiliki data ekstrim,

yaitu perusahaan dengan kode PSKT, perusahaan tersebut memiliki nilai INST = 0.9993 dan nilai Y = 0, dimana kepemilikan institusionalnya tinggi sedangkan *tax avoidance* rendah. Contoh lain perusahaan dengan kode UNSP yang memiliki nilai INST = 0.1893 dibawah rata – rata dan nilai Y = 14.9063346 atau perusahaan dengan kode INDF yang memiliki nilai INST = 0.5009 dan nilai Y = 15.31685311, dimana kepemilikan institusionalnya rendah sedangkan *tax avoidance* tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusional perusahaan pada periode 2013 mempunyai potensi terhadap praktek penghindaran pajak. Akan tetapi berpengaruh dengan arah yang negatif dimana kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan *tax avoidance* rendah begitu pula sebaliknya. Kondisi ini akibat kepemilikan institusional pada periode 2013 pada perusahaan di Indonesia cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Faktor lain yang menyebabkan hipotesis ini ditolak ialah kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak yang mulai tinggi, selain itu kepemilikan saham institusional juga berfungsi sebagai control yang baik terhadap tindakan manajemen perusahaan.

Hasil ini mendukung penelitian oleh Fadhilah (2014) dimana keberadaan investor institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan terhadap kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan.

Pengaruh Prosentase Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa prosentase dewan komisaris independen (INDP) mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 0,721 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak signifikan terhadap *book tax gap*.

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara prosentase dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak disebabkan peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak dalam perusahaan di Indonesia. Dapat dimungkinkan pula kurang tanggap dan tidak maksimalnya fungsi perusahaan yang dilakukan anggota dewan komisaris independen, sehingga kurangnya pengawasan dalam tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Adanya pihak – pihak yang terafiliasi dalam perusahaan yang mendominasi dan mempengaruhi fungsi independensi yang dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan menghambat proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Pranata (2014), Dewi (2014), dan Annisa (2012), yang menyatakan tidak menemukan peran dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap*. Selain itu berdasarkan nilai B atau beta jumlah dewan komisaris berarah positif (0.479) terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut teori jumlah dewan komisaris memiliki arah yang negatif yang berarti tingginya angka DK maka nilai BTG akan rendah begitu pula sebaliknya. Hasil ini patut diduga karena dikontribusi dengan karakter data yang diolah yang sama dengan hasil penelitian. Sebagai contoh dengan nilai rata – rata BTG = 11.1024 dan rata – rata DK = 4.1649, sedangkan pada sampel terdapat perusahaan yang memiliki data ekstrim, yaitu perusahaan ASII yang memiliki nilai DK = 10 dan nilai BTG = 16.91190231 yang berarti nilai DK yang tinggi maka akan tinggi pula *tax avoidance*. Contoh lain perusahaan dengan kode LAPD, LMPI, IKAI, dll yang memiliki nilai DK terendah yaitu 2 dan memiliki nilai Y = 0, maka memiliki pengaruh jumlah dewan komisaris yang rendah akan rendah pula *tax avoidance* nya.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada atau tidaknya dewan komisaris akan berpengaruh pada tindakan *tax avoidance* dimana dengan arah yang positif berarti tingginya jumlah dewan komisaris akan cenderung tinggi pula *tax avoidance* nya. Terdapat hal yang menjadi alasan mengapa hipotesis ketiga ditolak antara lain tidak semua anggota dewan komisaris dapat menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Selain itu jumlah dewan komisaris yang banyak dapat menyebabkan sulitnya koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris,

Penelitian ini mendukung pendapat Yermarck dan Jansen dalam Hardiningsih (2010) yang menyatakan bahwa makin banyaknya anggota dewan komisaris ada kecenderungan dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan karena kesulitan dalam komunikasi dan mengkoordinir kerja dari tiap anggota dewan itu sendiri serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa kualitas audit (AUDIT) mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *book tax gap*. Selain itu berdasarkan nilai B atau beta kualitas audit berarah positif (0.976) terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut teori kualitas audit memiliki arah yang negatif yang berarti tingginya kualitas audit maka akan rendah *tax avoidance* nya, begitu pula sebaliknya. Hasil ini patut diduga karena dikontribusi dengan karakter data yang diolah sama dengan hasil penelitian. Sebagai contoh nilai rata – rata BTG = 11.1024 dan nilai rata – rata AUDIT = 0.3656, sedangkan pada sampel terdapat perusahaan yang memiliki data

ekstrim, yaitu perusahaan dengan kode TLKM yang memiliki nilai AUDIT = 1 dan nilai BTG = 16.9470404, menunjukkan bahwa semakin tinggi AUDIT akan semakin tinggi pula BTG atau *tax avoidance*, hal ini berlaku sebaliknya.

Hal terkait penelitian ini bahwa kualitas audit pada tahun 2013 berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah positif, hal ini dikarenakan perusahaan masih dapat mempengaruhi independensi auditor dengan memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP, walaupun KAP mempunyai reputasi yang baik seperti kasus Enron tahun 2004. Alasan selanjutnya karena muncul kasus Enron yang membuat kepercayaan publik turun terhadap KAP *big four* dan mengembalikan kepercayaan publik tersebut tidaklah mudah membuat kesempatan bagi KAP *non big four* untuk berlomba – lomba menunjukkan keprofesionalitasnya pada publik dengan meningkatkan kualitas dan independensi auditnya.

Penelitian ini tidak mendukung beberapa penelitian milik Annisa (2012) dan Dewi (2014) hal ini dikarenakan KAP *big four* dianggap memiliki pengetahuan lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit (KOMITE) mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 0,683 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak signifikan terhadap *book tax gap*.

Dalam penelitian ini variabel komite audit menggunakan proksi jumlah komite audit dalam perusahaan. Sesuai hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan (Puspita, 2014). Hal ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan praktek pajak agresif bukan dari jumlah dari komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.

Hasil ini mendukung penelitian dari Pohan dalam Fadhilah (2014) dimana BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus 3 orang, jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Hardiningsih (2010) juga menyatakan dimana arah koefisien regresi yang negatif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa keberadaan komite audit kurang efektif untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik terdapat tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan – perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013. Variabel tersebut antara lain variabel kepemilikan institusional (INST) tetapi memiliki arah negatif, jumlah dewan komisaris (DK) yang memiliki arah positif, serta variabel kualitas audit (AUDIT) memiliki arah positif. Sedangkan variabel lain seperti prosentase dewan komisaris independen (INDP) dan variabel jumlah komite audit (KOMITE) tidak berpengaruh terhadap *book tax gap / tax avoidance* selain itu kedua variabel tersebut memiliki arah negatif. Hal ini mengindikasikan semua hipotesis yang diteliti ditolak karena perbedaan antara teori dan hasilnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode penelitian, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada suatu perusahaan dan tentunya akan memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat dimasa yang akan datang.
2. Baik dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan serta menambah variabel atau proksi lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak dijelaskan pada penelitian ini, seperti, karakter eksekutif, resiko perusahaan, ukuran perusahaan, *multinational company*, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, *retrun on assets*, konservatisme akuntansi.
3. Apabila pada penelitian selanjutnya dimungkinkan dapat memperoleh data – data tentang pajak penghasilan perusahaan, maka lebih baik menggunakan data tersebut sebagai pengukuran *tax avoidance* untuk hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. "Etika Bisnis dan Profesi". Salemba Empat – Jakarta.
- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2012. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*". **Jurnal Akuntansi & Auditing**, vol.8, No.2, Mei 2012, hal : 123 – 136.
- Dewi, Ni Nyoman. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan & Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada *Tax Avoidance*". **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**, vol 6.2, hal : 249 -260.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*". **Respository Universitas Negeri Padang**.

- Ghozali, Imam. 2006. “**Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**”. BPUD – Semarang.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*”. **Diponegoro Journal of Accounting**, vol.2, no.2, hal : 1 – 10.
- Hardiningsih, Pancawati. 2010. “Pengaruh Independensi, *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”. **Kajian Akuntansi**, Februari 2010, hal : 61 – 67.
- Indriantoro, Nur. 2002. “**Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**”. BPF – Yogyakarta.
- Jaya, Tresno Eko, dkk. 2014. “*Corporate Governance*, Konservatisme Akuntansi, dan *Tax Avoidance*”. **Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4**.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. 2013. “Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*”. **Buletin Studi Ekonomi**, vol.18, no.1, Februari 2013, hal : 58 – 66.
- Naja, Hasanudin Rahman. 2004. “**Manajemen Fit & Proper Test**”. Pustaka Widya Tama.
- Persada, Aulia Eka. 2010. “Analisi Faktor Yang Mempengaruhi *Book Tax Gap* dan Pengaruhnya Terhadap Persistensi Laba”. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia**, vol.7, no.2, Desember 2010, hal : 205 – 215.
- Pranata, Febri Mashudi, dkk. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”. **Skripsi Universitas Bung Hatta**.
- Purwono, Herry. 2010. “**Dasar – dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak**”. Erlangga – Jakarta.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. **Diponegoro Journal of Accounting**, vol.3, no.2, hal : 1 – 13.
- Rohman, Abdul. 2013. “**Perpajakan Pendekatan Peraturan**”. Pustaka Magister.
- Suandy, Early. 2008. “**Perencanaan Pajak**”. Salemba Empat – Jakarta.

Sugiyono. 2012. **“Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”**. Alfabeta – Bandung.

Tampubolon, Robert. 2006. **“Risk and System Based Internal Audit”**. Elexmedia Komputindo – Jakarta.

Zain, Mohammad. 2008. **“Manajemen Perpajakan”**. Salemba Empat - Jakarta.

[Http://www.beritasatu.com/hukum/6082-majumundur-kasus-pajak-asian-agri.html](http://www.beritasatu.com/hukum/6082-majumundur-kasus-pajak-asian-agri.html).

[Http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/23/03205910/Soal.Tukar.Guling.Bakrie.dan.Vallar](http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/23/03205910/Soal.Tukar.Guling.Bakrie.dan.Vallar).

[Http://www.detik.com/finance/read/2012/08/16/202537/1993697/4/](http://www.detik.com/finance/read/2012/08/16/202537/1993697/4/)

[Http://www.news.viva.co.id/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri](http://www.news.viva.co.id/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri).

[Http://www.news.viva.co.id/news/read/460321-strategi-negara-hadapi-perusahaan-yang-mengelak-bayar-pajak](http://www.news.viva.co.id/news/read/460321-strategi-negara-hadapi-perusahaan-yang-mengelak-bayar-pajak).